

**RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI  
DAFTAR AGENDA PRIORITAS ULP KANTOR PUSAT  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
TAHUN : 2017 - 2018**

NO	AGENDA PRIORITAS	OUTPUT (HASIL CAPAIAN)	PENANGGUNG JAWAB/PELAKSANA	VARIABEL	SUB VARIABEL	TARGET PENYELESAIAN		
						B03	B06	B09 B12.1
1	Penyusunan nilai-nilai organisasi yang dituangkan dalam dokumen (Pamflet, Edaran, Banner, dll)	Slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi yang harus diamalkan oleh pegawai ULP	Kepala ULP dengan dukungan/fasilitasi dan unit kerja yang membidangi organisasi	Organisasi	Budaya			√
2	Penyusunan Tata Laksana (SOP) Pemilihan penyedia	Tata Laksana (SOP) Pemilihan Penyedia yang telah ditetapkan	Kepala ULP, Biro Hukum, Direktorat Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, PPK dan Pokja	Tata Laksana	Pemilihan Penyedia			√
3	Penyusunan Pedoman Penyimpanan Dokumen Asli Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang ditetapkan Kepala ULP.	Tata laksana Penyimpanan Dokumen Asli Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang telah ditetapkan	Kepala ULP, Biro Hukum, Direktorat Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, PPK dan Pokja	Tata Laksana	Penyimpanan Dokumen Asli Pemilihan Penyedia			√
4	Penyusunan tata laksana tentang pelayanan pelaksanaan pemilihan penyediaan barang/jasa kepada Unit Satuan Kerja	Tata laksana tentang pelayanan pelaksanaan pemilihan penyediaan barang/jasa yang telah ditetapkan	Kepala ULP, Biro Hukum, Direktorat Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, PPK dan Pokja	Tata Laksana	Pelayanan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kepada Unit Satuan Kerja			√
5	Penyusunan tata laksana penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa.	Tata laksana Penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang telah ditetapkan.	Kepala ULP, Biro Hukum, Direktorat Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, PPK dan Pokja	Tata Laksana	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa			√
6	Penyusunan Tata Laksana Manajemen Resiko	Tata Laksana Manajemen Resiko yang telah ditetapkan	Kepala ULP, Biro Hukum, Direktorat Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, PPK dan Pokja	Manajemen	Manajemen Resiko			√

Jakarta, Maret 2017  
Kepala Unit Layanan Pengadaan Kantor Pusat  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

